

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe penelitian hukum	9
1.5.2 Pendekatan (Approach).....	9
1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources).....	10
1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	11
1.5.5 Analisis bahan hukum.....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II DASAR HUKUM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK.....	15

2.1	Persidangan Perkara Pidana Menurut KUHAP	15
2.1.1	Definisi dan Asas-Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP	16
2.1.2	Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan menurut KUHAP	24
2.2	Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik dimasa pemberlakuan Surat Edaran dan MoU	31
2.2.1	Kekuatan Mengikat SEMA	31
2.2.2	Kekuatan Mengikat MoU	35
2.3	Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik dimasa pemberlakuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020.	39
2.3.1	Kekuatan Mengikat PERMA	40
2.3.2	Ketentuan Pelaksana Hukum Acara Pidana Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020.	46
BAB III TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERMA NO 4 TAHUN 2020 TERHADAP ASAS-ASAS KUHAP		
3.1	Persidangan Pidana Elektronik Menurut KUHAP	52
3.1.1	<i>Ratio Legis</i> Munculnya PERMA No 4 Tahun 2020	53
3.1.2	Proses Pencarian Kebenaran Materiil Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik	56
3.2	Kesesuaian Penerapan Asas KUHAP dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik	61
3.2.1	Asas Sidang Terbuka Untuk Umum	62
3.2.2	Asas Persamaan Di Muka Hukum (Equality Before The Law)	68
3.2.3	Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Dengan Hadirnya Terdakwa.	72

BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78
DAFTAR BACAAN	79

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik